

ABSTRAK

KARIANDO SARAGIH. *Perlindungan Hukum Menurut Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sebagai Akibat Penjualan Saham (Akuisisi) Perusahaan PT. Bima Mitra Farma Tangerang (Dibimbing oleh Prof. Hendra Tanuatmadja,SH.,M.HUM.,LL.M.,MIP., dan Dr. Helvis, SH.,MH.)*

Adapun yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah oleo karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja di PT. Bima Mitra Farma Tangerang, sebagai akibat penjualan saham (akuisisi) perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja PT. Bima Mitra Farma Tangerang sebagai akibat penjualan saham (akuisisi) perusahaan menurut Undang – Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan yang kedua, Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja PT. Bima Mitra Farma Tangerang, sebagai akibat akuisisi perusahaan menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui apa upaya dan peranan pemerintah dalam hal penyelesaian terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagai akibat terjadinya akuisisi perusahaan. Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Kemudian pada tahap kedua adalah melakukan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif, yaitu apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam penyelesaian hubungan kerja sebagai akibat akuisisi perusahaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 163 ayat 2(dua) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *pertama* akibat yang timbul ditinjau dari segi hukum korporasi maupun dari aspek bisnis, maka pengambilalihan saham tidak mengakibatkan PT. Bima Mitra Farma Tangerang menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti sedia kala, hanya pemegang sahamnya yang beralih, dari pemegang saham semula kepada pemegang saham yang mengambil alih (pengakuisisi). *Kedua*, Bahwa dalam penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), apabila inisiatif PHK dari pihak perusahaan pengakuisisi, maka baik pekerja PKWT (karyawan kontrak) maupun bagi pekerja PKWTT (karyawan tetap), harus dibayarkan ganti rugi atau pesangon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 163 ayat 2(dua) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata-kata kunci: Akuisisi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

ABSTRACT

KARIANDO SARAGIH. *According to the Legal Protection Act - Act No. 13 of 2003 on Labor Against Workers Due to Termination (PHK) As a result of Sale of Shares (Acquisition) The Company PT. Bima Mitra Farma Tangerang (Under supervision of Prof. Hendra Tanuatmadja oleo, SH., M. Hum., LL.M., MIP, and Dr. Helvis, SH., MH.).*

As for the background of this research is because of the Termination of Employment (FLE) on workers at PT. Bima Mitra Farma Tangerang, as a result of the sale of shares (acquisition) of companies. The purpose of this study is the first to find out how the legal protection of the workers of PT. Bima Mitra Farma Tangerang as a result of the sale of shares (acquisition) of companies under Law - No. 13 of 2003 on Manpower. The second objective, to find out how the settlement of Employment Termination (PHK) to workers of PT. Bima Mitra Farma Tangerang. The third objective is to know what efforts and the role of government in terms of the completion of the Employment Termination (PHK), as a result of the acquisition of the company. In this thesis using normative legal research methods, the research aimed to obtain the objective laws (legal norms), namely by conducting research on legal issues. Then in the second stage is to conduct research that is intended to have legal subjective, namely what are the rights and obligations of the parties in the settlement of labor relations as a result of the acquisition of the company, as stipulated in Article 62 and Article 163 paragraph two (2) of Law No. , 13 Year 2003 on Manpower. From the results of this study concluded that the first consequences arising in terms of corporate law as well as from the business aspect, it did not result in the acquisition of shares of PT. Bima Mitra Farma Tangerang be dissolved or ended. The Company still existing and valid as ever, only shareholders who switched from the original shareholders to the shareholders who take over (the acquirer). Second, that the completion of Termination (PHK), if the initiative layoffs of the acquirer, then both workers PKWT (contract employees) as well as for workers PKWTT (permanent employees), should be paid compensation or severance pay, as stipulated in Article 62 and Article 163, paragraph 2 (two) of Law No. 13 Year 2003 on Manpower.

Key words: Acquisitions, Employment Termination (PHK)